



KORAN	HAL
Haluan	
Padang Ekspres	
Singgalang	
Pos Metro	2

Tanggal

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Bulan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

# Bupati dan DPRD Kabupaten Solok Didemo 2 Kelompok Massa



DEMO— Dua kelompok massa melakukan aksi unjuk rasa di Kompleks Perkantoran Bupati Solok.

**Desak Wali Nagari Gantung Ciri Diaktifkan**  
**Usut Temuan BPK Rp 5,7 Miliar**  
 SOLOK, METRO  
 Gelombang aksi demo masyarakat kembali mendatangi kompleks perkantoran Bupati Solok dan Kantor DPRD Kabupaten Solok di Arosuka, Kamis (28/12). Kali ini dua kelompok masa serentak melaksanakan unjuk rasa dengan menyampaikan tuntutan yang berbeda.

» Ke Hal 2

## Bupati..... dari hal 1

Akibat ramainya masa yang berunjuk rasa, ruas jalan di depan kompleks perkantoran Bupati Solok terpaksa ditutup petugas. Arus kendaraan yang melintas di ruas jalan lintas sumatra Solok - Padang itu terpaksa dialihkan. Bahkan, petugas terpaksa membuat pagar pembatas untuk memisahkan dua kelompok massa.

Masa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Pro Demokrasi Kabupaten Solok berunjuk rasa dengan berbagai tuntutan atas persoalan kebijakan Bupati Solok Epyardi Asda yang dinilai telah menimbulkan keresahan di tengah tengah masyarakat.

Mereka menuntut agar jabatan Wali Nagari Gantung Ciri yang diberhentikan sementara oleh Bupati Solok segera dikembalikan. Selain itu, mereka juga menyoroti persoalan Alahanpanjang Resort dan Cambai Hills segera dituntaskan.

Arif dari Koalisi Ma-

sarakat Sipil Pro Demokrasi Kabupaten Solok dalam orasinya menegaskan masyarakat saat ini butuh ketenangan. Massa meminta agar berbagai persoalan yang telah menimbulkan keresahan ditengah tengah masyarakat segera diselesaikan.

Sementara kelompok masyarakat yang menamakan diri mereka Solidaritas Lintas Nagari juga menggelar aksi unjuk rasa terhadap DPRD Kabupaten Solok. Mereka menuntut agar anggota DPRD Kabupaten Solok yang diduga terlibat menyelewengkan uang rakyat ditindak.

Masa aksi yang dikomandoi Arisvan Bachtiar itu menilai temuan BPK RI Sumbar atas penggunaan dana APBD oleh anggota dewan telah merugikan daerah. Dan mereka menuntut agar persoalan itu diusut.

"Saat ini kondisi Kabupaten Solok masih butuh perhatian, disaat Kabupaten solok harusnya diban-

gun secara bersama-sama, disaat ekonomi rakyat masih carut marut dalam kesusahan. Malah mereka (Anggota DPRD) sesuai hasil Audit BPK RI Perwakilan Wilayah Sumatra Barat di Tahun 2022 malah ditemukan lebih 90% wakil rakyat itu harus memulang uang negara akibat temuan perjalanan fiktif dan mark up anggaran perjalanan dinas dengan jumlah yang sangat fantastis yakni Rp5,7 miliar," bebarnya dalam orasi itu.

Kedua masa yang sudah terkonsentrasi semenjak pagi terus bertahan hingga sore hari guna menyuarkan tuntutan mereka. Mereka juga meminta agar dapat bertemu dengan anggota dewan.

Guna menghindari bentrokan saat berdialog dengan anggota dewan yang akan menerima mereka, anggota dewan tampak berkali kali melakukan koordinasi dengan pihak keamanan. Akhirnya diputuskan dewan menerima perwakilan dari masing masing masa aksi secara

bergantian diruang sidang DPRD Kabupaten Solok.

Dalam pertemuan perwakilan masa dari Kualisi Masyarakat Sipil Pro Demokrasi Kabupaten Solok dengan anggota dewan, perwakilan masa kembali menyampaikan tuntutan mereka. Dalam pertemuan itu tampak Ketua DPRD Kabupaten Solok Dodi Hendra, Ketua Fraksi Gerindra Hafni Hafiz, Dendi Ketua Fraksi PPP dan Effidzal Ketua Fraksi Demokrat menerima langsung perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Pro Demokrasi Kabupaten Solok.

Atas tuntutan Koalisi Masyarakat Sipil Pro Demokrasi Kabupaten Solok, perwakilan dewan menyikapi dan meminta Bupati Solok agar persoalan wali nagari Gantung Ciri segera dituntaskan dan mengembalikan jabatan wali nagari kepada Hendri Yudha.

Terkait tuntutan masyarakat atas persoalan kawasan Alahanpanjang Resort Ketua DPRD dan Ketua Fraksi yang hadir meminta agar Pansus di-

lanjutkan kenibali. Sedangkan tuntutan masyarakat atas persoalan kawasan Bukit Cambai Hills, persoalan ini akan dibahas d tingkat dewan.

Sementara itu masa yang tergabung dalam Solidaritas Lintas Nagari yang menuntut anggota dewan atas temuan BPK RI perwakilan Sumbar itu justru membubarkan diri dan urung bertemu dengan anggota DPRD Kabupaten Solok yang telah menunggu mereka.

Terkait tuding masa aksi yang menyebut anggota dewan maling uang rakyat, Hafni Hafiz menegaskan dirinya atas nama lembaga DPRD Kabupaten Solok akan menempuh jalur hukum. Karena tuduhan itu tidak berdasar dan telah mencemari nama baik lembaga DPRD Kabupaten Solok.

"Kita akan menempuh jalur hukum dan segera melaporkan kasus ini ke Polda Sumbar. Ini mencemarkan nama baik lembaga DPRD Kabupaten Solok," tegasnya. (vko)